E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867

Halaman 38-46
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026

Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi, Kualitas SDM, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Aldi Fedriansyah[1], Nofrianty[2], Fefti Yulian Mela[3]

[1,2,3]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian
e-mail: sadanaexo7@gmail.com[1] , nofriantyfeupp@gmail.com[2] , feftiyulian89@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, transparansi laporan keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik sampling jenuh terhadap 30 informan kunci yang terdiri atas pemerintahan desa, aparatur desa, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat, yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, akuntabilitas publik, transparansi laporan keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan adalah kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, sedangkan akuntabilitas publik dan transparansi laporan keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Bendahara.

Kata kunci: *Akuntabilitas Publik, Transparansi Laporan Keuangan Desa, Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa.*

Abstract

This study aims to determine the effect of public accountability, village financial report transparency, human resource quality, and community participation on village financial management in Lubuk Bendahara Village, Rokan IV Koto District, Rokan Hulu Regency. This study employed a quantitative approach with a saturated sampling technique involving 30 key informants consisting of village government officials, village apparatus, community leaders, and community members, analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS. The results show that, simultaneously, public accountability, village financial report transparency, human resource quality, and community participation have a significant effect on village financial management.

Partially, human resource quality and community participation have a significant effect, while public accountability and village financial report transparency do not have a significant effect on village financial management in Lubuk Bendahara Village.

Keywords: *Public Accountability, Village Financial Report Transparency, Human Resource Quality, Community Participation, Village Financial Management.*

LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi bertujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan komunitas hukum yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, dengan realisasi penerimaan pemerintah desa seluruh Indonesia yang terus meningkat dari Rp67,64 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp68,17 triliun pada tahun 2024 untuk pos Dana Desa saja.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di seluruh desanya sejak tahun 2017. Salah satu desa di Kecamatan Rokan IV Koto, yaitu Desa Lubuk Bendahara, turut melakukan pengelolaan terhadap keuangan desa, dengan jumlah pendapatan desa yang cenderung meningkat dari Rp1,74 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2,16 miliar pada tahun 2022, meskipun sedikit menurun menjadi Rp2,04 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penurunan realisasi Dana Desa.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban—wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab pihak yang diberi kepercayaan (agen) untuk mempertanggungjawabkan, menyampaikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas dan tugas kepada pihak yang memberikan kepercayaan (prinsipal), sebagaimana digambarkan dalam hubungan principal-agent pada teori keagenan yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976), di mana masyarakat bertindak sebagai principal yang memberikan mandat kepada pemerintah desa sebagai agent untuk menjalankan berbagai kegiatan atas nama masyarakat.

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan peneliti, pemerintah Desa Lubuk Bendahara menghadapi berbagai hambatan dalam pengelolaan keuangan desa, di antaranya kurangnya sumber daya manusia (SDM) di desa, minimnya pengetahuan atau keterampilan perangkat desa, serta peraturan dan sistem aplikasi keuangan yang terus berubah. Selain itu, meskipun pemerintah desa telah berupaya melakukan transparansi melalui musyawarah desa, publikasi baliho, dan papan pembangunan,

tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa masih rendah, sehingga usulan yang dihasilkan sering kali belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat.

Riset-riset terdahulu juga telah mengkaji pengelolaan keuangan desa dengan hasil yang beragam. Noholo (2021) menemukan bahwa prinsip akuntabilitas dan kompetensi SDM aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sementara Rama Yanti dan Tiswiyanti (2026) juga menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hindrayani dan Wati (2021) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, berlawanan dengan penelitian Subandra, Usdeldi, dan Nofriza (2022) yang menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, namun partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi empiris yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya pada Desa Lubuk Bendahara yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan hasil penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas publik, transparansi laporan keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, baik secara parsial maupun simultan.

METODE

Objek penelitian ini adalah pengaruh akuntabilitas publik, transparansi keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, yang dilakukan di Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2026), yang bertujuan menilai seberapa besar pengaruh keempat variabel independen terhadap pengelolaan keuangan desa.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam tim pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Bendahara (Dewi, 2019), yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kaur/kasi yang membidangi keuangan desa, kaur/kasi pelaksana kegiatan, kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), enam kepala dusun, enam tokoh masyarakat (satu per dusun), dan dua belas unsur masyarakat (dua per dusun). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (Sugiyono, 2026), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden, sehingga diperoleh 30 informan sebagai sampel penelitian.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert lima poin (Sugiyono, 2026). Variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) diukur menggunakan indikator penyusunan APBDes, penyampaian dokumen tepat waktu, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Lubis, 2020). Variabel Akuntabilitas Publik (X1) diukur menggunakan indikator kesesuaian pelaksanaan dengan standar prosedur, dokumen pertanggungjawaban tertulis, standar etika, konsistensi target operasional, dan pertanggungjawaban keuangan (Saputra, 2026). Variabel Transparansi Laporan Keuangan Desa (X2) diukur menggunakan

indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen keuangan, kejelasan informasi, keterbukaan pengelolaan, dan sistem informasi manajemen (Lubis, 2020). Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X3) diukur menggunakan indikator pengetahuan, keterampilan, pelatihan, dan sikap kerja (Lubis, 2020). Variabel Partisipasi Masyarakat (X4) diukur menggunakan indikator keberadaan kelompok penampung partisipasi, keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta penyampaian pendapat dalam pengambilan keputusan (Saputra, 2026).

Analisis data dilakukan menggunakan model regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS (Basuki & Prawoto, 2017), meliputi uji asumsi klasik (normalitas melalui uji Kolmogorov-Smirnov, multikolinearitas melalui nilai Tolerance dan VIF, heteroskedastisitas melalui scatterplot, serta autokorelasi melalui uji Durbin-Watson), analisis regresi linear berganda dengan model Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e, uji koefisien determinasi (Adjusted R Square), serta pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) pada tingkat signifikansi 5% (Basuki & Prawoto, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil	Kesimpulan
Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)	Exact Sig. (2-tailed) = 0,149	Residual berdistribusi normal (Sig. > 0,05)
Multikolinearitas	Tolerance 0,157–0,513; VIF 1,951–6,362 (seluruh variabel)	Tidak terjadi multikolinearitas (Tolerance > 0,10; VIF < 10)
Heteroskedastisitas (Scatterplot)	Titik residual tersebar acak tanpa pola tertentu	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Autokorelasi (Durbin-Watson)	Nilai DW = 1,787	Tidak terjadi autokorelasi (mendekati 2)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026

Hasil uji asumsi klasik pada Tabel 1 menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat normalitas, tidak mengalami multikolinearitas, tidak mengalami heteroskedastisitas, dan tidak mengalami autokorelasi, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	25,559	-	-

Akuntabilitas Publik (X1)	0,073	0,342	0,735
Transparansi Laporan Keuangan Desa (X2)	0,379	1,930	0,065
Kualitas Sumber Daya Manusia (X3)	-1,030	-3,677	0,001
Partisipasi Masyarakat (X4)	1,428	5,124	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026. Variabel dependen: Pengelolaan Keuangan Desa; t tabel = 1,697

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh persamaan regresi Y = 25,559 + 0,073X1 + 0,379X2 − 1,030X3 + 1,428X4. Nilai konstanta sebesar 25,559 menunjukkan bahwa apabila keempat variabel independen bernilai tetap, maka Pengelolaan Keuangan Desa diperkirakan sebesar 25,559. Koefisien regresi Kualitas Sumber Daya Manusia bernilai negatif sebesar -1,030, sedangkan koefisien regresi Partisipasi Masyarakat bernilai positif sebesar 1,428; kedua variabel lainnya (Akuntabilitas Publik dan Transparansi) tidak diinterpretasikan lebih lanjut karena tidak signifikan secara statistik.

Tabel 3. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

F	Sig.	R Square	Adjusted R Square
20,861	0,000	0,769	0,733

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 20,861 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga H5 diterima, yang berarti Akuntabilitas Publik, Transparansi Laporan Keuangan Desa, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,733, yang berarti keempat variabel independen mampu menjelaskan 73,3% variasi Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan sisanya sebesar 26,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji t menunjukkan variabel Akuntabilitas Publik memiliki nilai signifikansi 0,735 (> 0,05), sehingga H1 ditolak; Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lubuk Bendahara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik akuntabilitas yang dijalankan pemerintah desa masih bersifat formalitas dan administratif, belum menyentuh aspek substantif yang mampu mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik; meskipun laporan keuangan telah dipublikasikan melalui papan pengumuman atau musyawarah desa, masyarakat sering kali belum memahami isi laporan tersebut atau belum terlibat aktif dalam pengawasan. Akuntabilitas keuangan desa seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek administratif seperti tersusunnya laporan, tetapi juga mencakup dimensi integritas dan kepedulian terhadap kepentingan publik (Hasniati, 2016), sejalan dengan pandangan bahwa konsep tata kelola yang baik hanya dapat terwujud apabila terdapat tanggung

jawab substantif, bukan sekadar formalitas administratif (Oktari & Solikhin, 2024). Persoalan tidak berpengaruhnya akuntabilitas publik ini juga diduga terkait dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan yang akurat serta menjalankan fungsi pengawasan dan komunikasi publik secara memadai. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Noholo (2021), yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, maupun Rama Yanti dan Tiswiyanti (2026), yang juga menemukan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa; perbedaan ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pertanggungjawaban belum tentu secara langsung meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan apabila pelaksanaannya masih bersifat administratif semata.

Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji t menunjukkan variabel Transparansi Laporan Keuangan Desa memiliki nilai signifikansi 0,065 (> 0,05), sehingga H2 ditolak; Transparansi Laporan Keuangan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lubuk Bendahara. Pemerintah desa telah berupaya mendorong transparansi melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menggunakan media baliho di berbagai sudut strategis desa, namun upaya tersebut tampaknya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya dipahami atau dimanfaatkan oleh masyarakat, ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memantau atau menggunakan informasi keuangan desa tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rama Yanti dan Tiswiyanti (2026) serta Subandra, Usdeldi, dan Nofriza (2022), yang juga menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, namun berbeda dengan Hindrayani dan Wati (2021), yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa; perbedaan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak cukup hanya diukur dari tersedianya informasi, tetapi juga dari kualitas informasi, kemudahan akses, dan pemanfaatannya dalam proses pengawasan oleh masyarakat.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji t menunjukkan variabel Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki nilai signifikansi 0,001 (< 0,05) dengan koefisien regresi negatif sebesar -1,030, sehingga H3 diterima; Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lubuk Bendahara. Secara teori, kualitas SDM yang tinggi seharusnya menjadi penunjang utama pengelolaan keuangan desa yang efektif (Sari, Lubis, & Astuty, 2020), namun arah negatif dalam penelitian ini dapat terjadi apabila peningkatan kualitas SDM yang diukur hanya dari tingkat pendidikan dan pelatihan teknis tidak diiringi peningkatan integritas moral dan sistem pengawasan internal yang memadai; kondisi ini dapat dipahami dari keterbatasan jumlah SDM, keterampilan teknis perangkat desa, serta perubahan sistem aplikasi dan regulasi keuangan yang terus terjadi di Desa Lubuk Bendahara, sebagaimana perangkat desa dengan latar belakang pendidikan non-akuntansi cenderung mengalami kesulitan

dalam penyusunan laporan meskipun telah mengikuti pelatihan (Yuliani & Agustini, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan arah yang berbeda dari Noholo (2021) serta Hindrayani dan Wati (2021), yang menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa; perbedaan ini menegaskan bahwa kualitas SDM yang diukur melalui pendidikan atau kemampuan umum belum tentu otomatis menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih baik apabila tidak disertai pengalaman teknis dan kemampuan beradaptasi terhadap sistem.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji t menunjukkan variabel Partisipasi Masyarakat memiliki nilai signifikansi 0,000 (< 0,05) dengan koefisien regresi positif sebesar 1,428, sehingga H4 diterima; Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lubuk Bendahara. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa akan semakin baik ketika masyarakat berperan aktif dalam rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, sejalan dengan konsep partisipatif dalam tata kelola pemerintahan desa yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek aktif yang memberikan masukan, aspirasi, dan pengawasan (Indriani, Fahlevi, & Putri, 2019). Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan penetapan APBDes tidak hanya memberikan ruang partisipatif, tetapi juga memastikan pemahaman masyarakat terhadap hak dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan anggaran desa (Krisnawati et al., 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan Rama Yanti dan Tiswiyanti (2026), Abdullah, Tuli, dan Panigoro (2026), Subandra, Usdeldi, dan Nofriza (2022), serta Putra dan Rasmini (2019), yang seluruhnya menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Simultan Akuntabilitas Publik, Transparansi, Kualitas SDM, dan Partisipasi Masyarakat

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), yang berarti Akuntabilitas Publik, Transparansi Laporan Keuangan Desa, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga H5 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dan efektif tidak ditentukan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil kombinasi berbagai aspek tata kelola yang saling berkaitan: akuntabilitas menjadi fondasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, transparansi memungkinkan masyarakat memahami perencanaan dan realisasi anggaran, kualitas SDM menentukan ketepatan dan efisiensi pengelolaan, sedangkan partisipasi masyarakat mendorong pengawasan yang lebih kritis terhadap jalannya pemerintahan desa. Hasil ini sejalan dengan Rama Yanti dan Tiswiyanti (2026) serta Putra dan Rasmini (2019), yang menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa; penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan

menyertakan kualitas sumber daya manusia sebagai variabel independen, sehingga cakupannya lebih luas dari penelitian-penelitian sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas publik, transparansi laporan keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh signifikan (H1 ditolak), Transparansi Laporan Keuangan Desa tidak berpengaruh signifikan (H2 ditolak), Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan dengan arah negatif (H3 diterima), Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan (H4 diterima), dan secara simultan keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (H5 diterima), dengan kemampuan menjelaskan sebesar 73,3% variasi pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa Lubuk Bendahara disarankan untuk mendorong akuntabilitas publik tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga menyajikannya secara terbuka kepada masyarakat melalui infografis, papan informasi, atau forum musyawarah desa yang menjelaskan secara rinci realisasi anggaran dan capaian program, serta memanfaatkan platform digital atau media sosial untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan secara berkala. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban perlu terus dilakukan, disertai upaya memperkenalkan kepada masyarakat pentingnya keterlibatan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sampel data dan cakupan wilayah penelitian dengan melibatkan beberapa desa yang memiliki karakteristik berbeda, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, W., Tuli, H., & Panigoro, N. (2026). Pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada desa di Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 9(5), 2186–2194.

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis (Dilengkapi aplikasi SPSS & Eviews). Rajawali Pers.

Dewi, S. I. (2019). Buku pintar pengelolaan keuangan desa. Desa Pustaka Indonesia.

Hasniati. (2016). Model akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 2(1), 15–30.

Hindrayani, N. L. P., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hita Akuntansi dan Keuangan, 2(3), 448–460.

Indriani, M., Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). Partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan keuangan desa: Survey pada desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 111–130.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Krisnawati, N. M. G., Astrawan, G., Putri, P. R., Marleni, N. M. S., Kristian, N. P., & Krisantina, N. M. A. P. (2019). Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa Bresela Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 9(1), 37–46.

Lubis, A. (2020). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Deli Serdang (Tesis). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Noholo, S. (2021). Pengaruh kompetensi SDM, prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan. Jambura Accounting Review, 2(1), 66–75.

Oktari, A., & Solikhin, A. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 4(4), 580–584.

Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa. E-Jurnal Akuntansi, 132.

Rama Yanti, E., & Tiswiyanti, W. (2026). Keuangan desa (Studi kasus pada desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu), 12(01).

Saputra, Z. (2026). Pengaruh akuntabilitas transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Sari, N. E., Lubis, A., & Astuty, W. (2020). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Mutiara Akuntansi, 5(2), 107–126.

Subandra, A., Usdeldi, & Nofriza, E. (2022). Pengaruh transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Journal of Applied Accounting and Business, 4(2), 40–47.

Sugiyono. (2026). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Factors affecting the quality of local government financial statements. Jurnal Bisnis & Ekonomi, 14(1), 56–65.